



**Term
Of
Reference**

PENELITIAN A

2019

Universitas Sebelas Maret



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga *Term of Reference* (TOR) Penelitian Kegiatan Temu Administrator Muda Indonesia (Temu AdMI) Tahun 2019 ini akhirnya dapat diselesaikan. TOR ini merupakan panduan bagi para delegasi Temu AdMI dalam melakukan kegiatan penelitian sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan Temu AdMI Tahun 2019 di Universitas Sebelas Maret. TOR ini juga merupakan hasil evaluasi dari kegiatan-kegiatan Temu AdMI yang telah dilakukan sebelumnya, dimana terdapat banyak masukan yang meminta agar proses kegiatan penelitian ini dibuatkan suatu standar acuan baku yang dapat memberikan petunjuk praktis agar para delegasi Temu AdMI mendapatkan gambaran secara jelas dalam melakukan penelitian, baik dari tahapan kegiatan, sistematika penulisan, maupun hal-hal yang menyangkut teknis lainnya.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan TOR ini. Terimakasih kami sampaikan atas saran masukan dan bimbingannya serta kehadiran dan dukungannya dalam membantu sampai kepada TOR ini dapat rampung diselesaikan.

TOR ini merupakan rancangan awal yang dibuat atas dasar inisiatif dan inovasi Panitia Temu AdMI 2019 Universitas Sebelas Maret, yang tentu masih jauh dari kesempurnaan. Kami menyadari bahwa penyusunan TOR ini terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan TOR ini sangat diharapkan. Semoga TOR ini dapat memberikan manfaat kepada para delegasi Temu AdMI 2019 khususnya, dan bagi kegiatan Temu AdMI di tahun-tahun berikutnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Gambaran Umum	4
1.2 Maksud TOR Penelitian	4
1.3 Tujuan TOR Penelitian	4
1.4 Manfaat TOR Penelitian	5
BAB II.....	6
KETENTUAN UMUM.....	6
2.1 Ketentuan Umum Program Kegiatan Penelitian.....	6
2.2 Alur Penelitian	7
2.3 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Temu AdMI.....	8
2.4 Luaran Penelitian.....	9
BAB III PENELITIAN SUB TEMA 1	10
BAB IV PENELITIAN SUB TEMA 2.....	16
BAB V PENELITIAN SUB TEMA 3.....	21
BAB VI KRITERIA LUARAN PENELITIAN.....	26
6.1 Sistematika Penulisan Paper	26
BAB VII <i>REVIEWING</i> DAN EVALUASI MAKALAH PENELITIAN.....	30
BAB VIII PENUTUP.....	31
Lampiran I	32
Lampiran II.....	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Temu Administrator Muda Indonesia merupakan kegiatan pertemuan antar mahasiswa Administrasi Publik/Negara dan atau dalam konteks keilmuan Administrasi Publik/Negara se-Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk mengembangkan bidang keilmuan Administrasi Publik/Negara yang bersifat informal dengan pendekatan ilmiah serta mengedepankan azas kekeluargaan, keceriaan, dan keharmonisan. Kegiatan Temu Administrator Muda Indonesia dilaksanakan dengan 8 agenda yaitu gala *dinner*, seminar nasional, seminar *cluster*, diskusi *cluster*, *public hearing*, musyawarah AdMI, *farewell party*, dan *city tour*. Temu AdMI tahun 2019 diadakan di Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan jumlah target peserta sebanyak 50 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

Temu Administrator Muda Indonesia tahun 2019 dengan tema “*Dynamic Governace Achieving SDG’s*” bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai perkembangan pemerintahan Indonesia dalam rangka mencapai *Sustainable Development Goals (SDG’s)*.

1.2 Maksud TOR Penelitian

Maksud pembuatan TOR ini adalah sebagai pedoman bagi para delegasi dalam melakukan kegiatan penelitian sebagai syarat keikutsertaan pada Temu AdMI 2019.

1.3 Tujuan TOR Penelitian

Dengan adanya TOR Penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut.

- Menyusun sistematika penelitian yang sesuai dengan standarisasi yang berlaku dan disepakati bersama sebagai panduan dan acuan baku penelitian yang harus diikuti oleh tiap delegasi.
- Menyamakan persepsi antar delegasi terkait dengan sub-tema penelitian.
- Memberikan batasan-batasan penelitian agar sesuai dengan konteks sub-tema tiap *cluster*.



1.4 Manfaat TOR Penelitian

Manfaat dari disusunnya TOR Penelitian Temu Administrator Muda Indonesia (Temu AdMI) 2019 ini, antara lain:

- a. Memberikan petunjuk kepada delegasi dalam melakukan penelitian
- b. Meningkatkan kualitas penelitian beserta luarannya berupa laporan makalah penelitian.
- c. Keseragaman dalam kriteria penulisan dan batasan lingkup luaran penelitian.



BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1 Ketentuan Umum Program Kegiatan Penelitian

Program kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai macam permasalahan berkaitan dengan perkembangan paradigma Administrasi Publik/Negara. Penelitian ini dilakukan oleh para delegasi yang merupakan perwakilan mahasiswa Administrasi Publik/Negara se- Indonesia yang akan ikut serta pada kegiatan Temu AdMI 2019. Penelitian dapat berbentuk kajian ilmiah sebagai upaya pemecahan masalah dan pemberian solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh tiap- tiap delegasi akan dibahas dan didiskusikan bersama pada kegiatan Temu AdMI 2019 di Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan pada *stakeholder* pemerintah yang terkait.

Kegiatan penelitian ini merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh delegasi sebagai syarat keikutsertaan pada kegiatan Temu AdMI. Pelaksanaan kegiatan penelitian mengacu pada standar acuan TOR Penelitian yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan ketentuan umum program kegiatan penelitian yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Tim Delegasi merupakan perwakilan mahasiswa jurusan Administrasi Publik/Negara dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- b. Anggota tim delegasi berjumlah 4 orang (termasuk ketua tim dan *Steering Committee* (SC)), diharapkan peserta memiliki komposisi regenerasi angkatan yang merata.
- c. Nama-nama dari tiap delegasi (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap, tidak disingkat.
- d. Setiap delegasi wajib melakukan registasi pendaftaran dan membayar biaya registrasi.
- e. Penelitian dilakukan oleh peserta tetap dan peserta peninjau Temu AdMI 2019.
- f. Tiap perwakilan universitas harus memiliki minimal satu Dosen Pembimbing dan satu SC, kecuali bagi peserta delegasi yang baru bergabung di Temu AdMI tahun ini diperbolehkan untuk tidak memiliki SC.
- g. *Steering Committee* adalah mahasiswa aktif yang pernah menjadi delegasi pada Temu AdMI.



- h. Tema penelitian harus sesuai dengan pembagian *cluster* hasil Temu AdMI sebelumnya.
- i. Tema penelitian bagi tim delegasi yang baru mengikuti Temu AdMI tahun ini, ditentukan oleh Panitia Temu AdMI 2019 Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- j. Penelitian dilaksanakan sampai batas waktu yang ditentukan.
- k. Delegasi harus memperhatikan kriteria penulisan, ruang lingkup dan batasan penelitian dari tiap sub-tema *cluster* masing-masing.
- l. Keseluruhan hasil luaran penelitian dikumpulkan dan dikompresi dalam satu file format pdf kemudian di kirim ke email penyelenggara, sedangkan *hardcopy* dibawa pada saat pelaksanaan Temu AdMI 2019.
- m. Serta menyiapkan bahan persentasi berupa PPT dan mengirimkan file PPT ke email Temu AdMI dengan format subjek email *UNIVERSITAS_CLUSTER*.

2.2 Alur Penelitian





2.3 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Temu AdMI

Secara ringkas tahapan kegiatan penelitian terdiri dari tahapan persiapan, pendaftaran, pelaksanaan, dan pengumpulan makalah. Rincian mengenai tahapan proses kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Pendaftaran Delegasi	25 Mei – 19 Juni
Pengumpulan Abstrak Penelitian	11 Juni -19 Juni
Pelaksanaan Penelitian	20 Juni – 31 Agustus
Batas Akhir Pengumpulan Makalah Penelitian	1 September
Verifikasi oleh Panitia	2 - 5 September
<i>Reviewing</i> dan Evaluasi oleh IAPA	6 September – 6 Oktober
Pengumuman Hasil Evaluasi dan Revisi Makalah Penelitian	7 Oktober
Penyusunan Revisi Makalah	7 Oktober – 13 Oktober
Temu AdMI 2019	3 November - 8 November



2.4 Luaran Penelitian

Sesuai dengan tujuan kegiatan Temu AdMI sebagai forum ilmiah yang melakukan pendalaman, pembahasan, dan penelaahan terkait isu-isu keilmuan Administrasi Publik/Negara, dan mengacu pada konsep Temu AdMI 2019 di Universitas Sebelas Maret, maka program penelitian ini diharapkan memiliki luaran berupa:

- a. Publikasi ilmiah dalam bentuk Makalah Penelitian
- b. Publikasi ilmiah dalam bentuk Proceeding
- c. Publikasi ilmiah dalam bentuk Jurnal *spirit public* untuk paper yang memperoleh penghargaan *best paper*.



BAB III

PENELITIAN SUB TEMA

CLUSTER I : *INTERCONNECTED GOVERNANCE*

3.1 Konsep Umum

Salah satu contoh riil dari penerapan *Interconnected Governance* antara pusat dan daerah tercermin pada Pemerintahan Bengkulu yang selalu berusaha untuk menyingkronisasi setiap kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Sinkronisasi dengan pemerintah pusat itu dilakukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan pusat. RPJMN yang dibuat pemerintah pusat itu diimplementasikan di daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi, kota, dan kabupaten di Bengkulu. Untuk menyelaraskan pelaksanaan RPJMN yang dibuat pusat dan RPJMD yang dibuat daerah, maka APBD provinsi setiap tahun harus dikoreksi oleh Kementerian Dalam Negeri dan APBD kabupaten dan kota dikoreksi juga oleh Pemerintah Provinsi.

Interconnected memiliki arti timbal balik dari suatu hubungan yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan *Governance* (Collins, 2009) adalah tindakan, cara, atau sistem dalam sebuah pemerintahan. Esensi governance adalah pada fokusnya yaitu mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang tidak lagi bergantung pada bantuan dan sanksi dari pemerintah. *Interconnected Governance* dengan menggunakan pendekatan *Thinking Across* sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Hubungan antara pusat dan daerah maupun daerah satu dengan daerah lainnya atau antar stakeholder sangat diperlukan untuk menjalankan suatu kebijakan dan tujuan pemerintah pusat serta daerah agar dapat tercapai, selaras dan meminimalisir program-program yang kurang sesuai dengan rancangan pembangunan.

Di era modern sekarang ini, hubungan antar pemerintahan sangat dinamis dan sangat cepat berkembang, untuk mewujudkan *Interconnected Governance* di Indonesia pada era sekarang contoh lain yang dapat dijadikan gambaran adalah dibentuknya *Mall Pelayanan Publik*.



Mall Pelayanan Publik pertama di Indonesia berada di Surabaya, hal ini sesuai dengan keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 135 Tahun 2017 tentang penetapan percontohan *Mall* Pelayanan Publik yaitu Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Batam, Pemkot Surabaya, Pemkot Denpasar.

Mall Pelayanan Publik diselenggarakan oleh organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Ruang lingkup *Mall* Pelayanan Publik meliputi seluruh pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/Swasta. Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah /Swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepakatan. *Mall* Pelayanan Publik merupakan wajah baru pelayanan publik di Indonesia. Dengan adanya *Mall* Pelayanan Publik seluruh pelayanan dan pengurusan tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan terintegrasi antara perizinan daerah maupun pusat terintegrasi dalam satugedung.

Konsep *Interconnected Governance* juga diperlukan untuk mengatasi masalah antar daerah satu dengan daerah lainnya. Suatu daerah yang berhubungan geografis secara langsung dengan daerah lainnya biasanya terjadi suatu masalah misalnya bencana banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan kiriman air dari Bogor. Dalam rangka mengantisipasi banjir kiriman dari Bogor, Pemprov DKI Jakarta memberikan dana sebesar Rp 10 Miliar guna membangun kolam retensi seluas tujuh (7) ribu meter persegi di Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dengan tujuan mengantisipasi banjir akibat adanya luapan air sungai. Kerjasama ini sangat diperlukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bogor untuk mencegah terjadinya banjir di Jakarta.

Bentuk lain penerapan *Interconnected Governance* adalah kebijakan desentralisasi. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.



Dengan rumusan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, secara teoritis akan memberikan kepercayaan bagi masing-masing daerah otonom untuk mengelola wewenang yang lebih besar dan lebih luas, terutama pada daerah kabupaten dan kota (Soehino, 2002:30). Salah satu keberhasilan desentralisasi adalah Kabupaten Mimika, Papua, yang menerima dana bagi hasil dari PT. Freeport sebanyak Rp 769 miliar.

Dana tersebut di diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menyatakan daerah Mimika memperoleh dana bagi hasil sebanyak 32% dari total royalti yang dibayarkan PT. Freeport kepada Pemerintah Indonesia karena Kabupaten Mimika merupakan daerah penghasil. PT. Freeport Indonesia mengklaim dengan disepakatinya *Head of Agreement* (HoA) ini, kontribusi tambang di Papua bisa ditingkatkan dan memberikan manfaat ke RI sebanyak Rp 840 triliun.

Beberapa konsep *Interconnected Governance* diatas telah berhasil dikembangkan di Indonesia, akan tetapi kebijakan *Interconnected Governance* yang berkaitan akan dapat terlaksana dengan baik apabila dikolaborasikan dengan program *United Nations Development Programme* (UNDP) yaitu *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang memiliki 17 tujuan yang menjadi urgensi untuk dikembangkan secara optimal oleh pemerintah. Namun tak jarang, penerapan program SDG's tersebut terbentur dengan minimnya Peraturan Daerah (Perda) yang belum dihubungkan dengan program-program SDGs. Oleh karena itu, guna meningkatkan mutu pembangunan di Indonesia perlu dilaksanakan program PBB tersebut menggunakan konsep *Interconnected Governance*.

Dengan melakukan kerjasama dan hubungan timbal balik, diharapkan akan ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Misalnya, melalui kerjasama antar daerah mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di suatu wilayah yang akan meningkatkan daya saing kawasan. Karena seringkali terjadi pengembangan ekonomi suatu wilayah terhambat keterbatasan cakupan wilayah. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama.

Tanpa adanya kerjasama tersebut, penanganan lingkungan tidak akan berjalan sinergis sehingga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, tidak hanya bagi daerah tersebut, tetapi juga bagi daerah lain yang secara geografis berdekatan, seperti kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor.

Dengan demikian, hubungan pemerintah pusat dan daerah, maupun daerah satu dengan daerah lain tidak akan bisa dipisahkan sebagai sarana luas yang memberikan pelayanan menyeluruh terhadap masyarakat sebuah bangsa. Jika diartikan secara umum maka kedua jenis pemerintahan ini memegang tanggung jawab yang sejalan.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Pemberian batasan ruang lingkup penelitian yang dilakukan untuk delegasi Temu AdMI 2019 terhadap sub tema tersebut diperlukan agar terfokus dan tidak menimbulkan persepsi bercabang. Oleh karena itu, perlu adanya penyamaan sudut pandang dalam ruang lingkup kajian penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu melebar dalam pembahasan dan substansi, serta dapat tercapainya kesamaan ragam pembahasan penelitian dan tujuan.

Adapun ruang lingkup penelitian mengenai *Interconnected Governance*, di antaranya berkaitan dengan :

1. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Interconnected Governance* dalam rangka mewujudkan *Gender Equality*.
2. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Interconnected Governance* dalam rangka *Good Health and Well being for people*.
3. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Interconnected Governance* dalam rangka meningkatkan *Quality Education*.
4. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Interconnected Governance* dalam rangka meningkatkan *Decent Work and Economic Growth*.
5. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Interconnected Governance* dalam rangka mewujudkan *Sustainable Cities and Communities*.
6. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Interconnected Governance* dalam rangka mendukung *Climate Action*.

Tanpa mengurangi kreativitas dan inovasi dalam melakukan penelitian, diharapkan pembatasan ruang lingkup penelitian ini dapat berdampak bagi peningkatan kualitas penelitian delegasi TEMU AdMI 2019.

3.3 Kriteria Penelitian Sub Tema *Inteconnected Governance*

1. Penelitian ini dilakukan pada instansi yang terkait dengan sub tema *Interconnected Governance*.
2. Penelitian meliputi muatan yang terdapat dalam ruang lingkup penelitian dan sejalan dengan konsep umum sub tema *Interconnected Governance*.
3. Penelitian membahas mengenai masalah atau isu-isu terkini mengenai aspek sub tema *Interconnected Governance*.
4. Penelitian harus didasarkan pada teori-teori yang relevan atau sumber-sumber ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sub tema *Interconnected Governance*.
5. Penelitian disertai dengan mencantumkan dasar hukum atau kebijakan-kebijakan yang terkait sub tema *Interconnected Governance*.
6. Penelitian mengenai setiap Sub Tema berdasarkan hasil observasi langsung.
7. Apabila tidak terdapat program yang sesuai dengan sub tema *Interconnected Governance*, maka sub tema tersebut dapat diadopsi sebagai rekomendasi pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan dalam objek penelitian.
8. Hasil penelitian mampu memberikan solusi bagi instansi terkait khususnya dan pemerintah Indonesia pada umumnya di bidang yang sesuai dengan sub tema *Interconnected Governance*.

Referensi

- Antara. 2018 Agustus 1. Pemkab Mimika Sudah Terima Bagi Hasil Freeport Rp 536 Miliar. Tempo.(diakses 03-04-2019, 23.15, bisnis.tempo.co)
- Collins. 2009. Corporate Governance and Firmn Value: Evidence from South African (SA) Listed Firman.
- Dinnata, Regi Yanuar William. 2018. DKI Bantu Pemkot Bogor Rp 10 Miliar Bangun Kolam Retensi. Bisnis.com
- Imanuddin, Muhammad. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB.



Temu AdMI 2019

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Daerah Dukung Penuh Kebijakan Pusat.

Suara Pembaruan.

Soehino. 2002. *Ilmu Negara (dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jedawi,

Murtir:2008). Yogyakarta: Liberty.



www.officialtemuadmi.org

📱 @official_temuadmi
📧 info.temuadmi
📺 Official Temu Admi
✉ info@officialtemuadmi.org

BAB IV

PENELITIAN SUB TEMA

CLUSTER II : *LOCAL INDIGENOUS GOVERNANCE*

4.1 Konsep Umum

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku dan agama. Keberagaman yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia menjadi sangat kaya. Kekayaan atas keberagaman pula yang membuat Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk. Kemajemukan yang ada di Indonesia merupakan sebagai salah satu dari adanya interaksi setiap masyarakat dengan keadaan alam dan lingkungan sekitarnya yang berkembang. Hal tersebut seringkali menciptakan sebuah kearifan lokal dan pemerintahan adat yang tentu setiap daerah wilayah, memiliki perbedaan.

Local dalam KBBI berarti setempat sedangkan *indigenous* diartikan sebagai asli yang dalam KBBI berarti tidak ada campurannya: tulen: murni. Sehingga secara harfiah, *Local Indigenous* berarti sesuatu yang segala sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat *local* di daerah tertentu yang merupakan ciri keaslian dan kekhasan daerah tanpa adanya pengaruh dari daerah lain. Sehingga menurut UNESCO, *local and indigenous knowledge refers to The understandings, skills and philosophies developed by societies with long histories of interaction with their natural surroundings* (Sebuah pemahaman, kemampuan dan filosofi yang dikembangkan oleh masyarakat dengan sejarah interaksi dengan alam di sekelilingnya yang lama). Inti dalam *Local Indigenous* adalah pemerintahan adat dan kearifan lokal.

Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang memiliki hukum adat atau bahkan pemerintahan adat. Hukum adat tersebut merupakan manifestasi dari kearifan lokal yang terformalisasi. Kearifan tersebut terpatut dalam filsafat hidup manusia yang merumuskan dan menjalankannya. Sebagai contoh dalam masyarakat Batak Toba dikenal dengan filsafat *dalihan na tolu* (DNT), dalam masyarakat Aceh dikenal *adat bak petu meuruhom hukom bak syaiah kuala*, dalam kebudayaan Minangkabau ada filsafat *alam nan takambang menjadi guru*, dalam kebudayaan Jawa terdapat filsafat *alon-alon waton kelakon* dan *sederek* dan lain-lainnya. (Alfian, 1985:23).

Sehingga di berbagai daerah terbentuk hubungan yang khas antara penerapan adat dan penyelenggaraan pemerintah baik di daerah urban maupun rural.

Pada daerah Papua, lembaga adat sangat dominan sedangkan desa dinas tidak memiliki pengaruh. Berbeda dengan di Jawa, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan Timur, dan sebagian Sumatera, di daerah tersebut, pengaruh adat sangat kecil.

Di Sumatera Barat terjadi kompromi antara adat dan desa dinas, dikarenakan lembaga adat dan desa dinas sama-sama kuat. Di Bali seperti juga di Kalimantan Barat, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Maluku pengaruh lembaga adat jauh lebih kuat ketimbang desa dinas. (Adharinalti, 2012).

Kearifan lokal juga terefleksi dari pola adaptif masyarakat terhadap kondisi geografis dan ekologis setempat. Misalnya masyarakat Minangkabau yang membangun Rumah Gadang guna menjaga diri dari gempa karena berada di wilayah Pegunungan Bukit Barisan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut mendukung langkah antisipatif tersebut dengan memberi alokasi dana untuk pembangunan rumah gadang di daerah-daerah strategis. Adanya beberapa daerah yang memiliki produk hukum lokal, sebagai bentuk adanya pemerintahan adat yang kuat seperti di beberapa daerah di atas, diperlukan adanya konsep yang dapat mengakomodasi kepentingan antara hukum yang berasal dari desa dinas dan pemerintah desa. Apa yang telah menjadi kekayaan budaya masyarakat seyogianya tidak kandas dan hilang terdiskresi dengan adanya pemerintahan desa. Sebagai sebuah aturan yang mengatur keduanya telah ada dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi Negara Mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang.

Konsep *Local Indigenous Governance* juga diperlukan untuk menopang eksistensi penyelenggaraan otonomi daerah. Desentralisasi yang terpatut dalam UU Nomor. 23 Tahun 2014 mengamanatkan terciptanya titik *equilibrium* dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, yaitu satu sisi pemerintah daerah harus memperhatikan aspirasi dan kearifan lokal masyarakatnya, sedang disisi lain harus memperhatikan kepentingan nasional dalam merumuskan kebijakan.

Pada kondisi ini maka pelimpahan wewenang ke daerah akan mampu menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat, hal ini karena output dari sistem pemerintahan daerah muncul dari proses *bottom-up* dan kontekstual dengan kondisi masyarakat sekitar.

Salah satu kota yang berhasil mengelaborasi kearifan lokalnya supaya mampu bersaing dengan dunia global adalah Kota Bandung. Hal ini dapat kita lihat dari pemberian Anugerah Kebudayaan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kepada wali kota Mochamad Ridwan Kamil karena mampu membangun Kotamadya Bandung menjadi kota metropolitan baru berkelas internasional dengan pendekatan kebudayaan sunda (Warta Ekonomi.co.id, 2015).

4.2 Ruang Lingkup Penelitian

Pemberian batasan ruang lingkup penelitian yang dilakukan untuk delegasi TEMU AdMI 2019 terhadap sub tema tersebut diperlukan agar terfokus dan tidak menimbulkan persepsi bercabang. Oleh karena itu, perlu adanya penyamaan sudut pandang dalam ruang lingkup kajian penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu melebar dalam pembahasan dan substansi, serta dapat tercapainya kesamaan ragam pembahasan penelitian dan tujuan.

Beberapa konsep *Local Indigenous Governance* diatas telah berhasil dikembangkan di banyak wilayah di Indonesia. Konsepsi tersebut akan menghasilkan manfaat yang lebih optimal dan terukur manakala dikolaborasi dengan program UNDP yaitu *Sustainable Development Goals (SDG's)*. *SDG's* yang memiliki 17 tujuan yang menjadi urgensi untuk dikembangkan secara optimal oleh pemerintah. Namun tidak jarang penerapan *SDG's* seringkali terbentur dengan sedikitnya Peraturan Daerah (Perda) yang belum terkoneksi dengan program-program *SDG's*. Oleh karena itu, guna meningkatkan mutu pembangunan di Indonesia perlu dilaksanakan program PBB (Pembangunan Perserikatan Bangsa – Bangsa) yang menggunakan konsep *Local Indigenous Governance*.

Adapun ruang lingkup penelitian mengenai *Local Indigenous Governance*, di antaranya berkaitan dengan :

1. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Local Indigenous Governance* dalam rangka mewujudkan *Gender Equality*.
2. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Local Indigenous Governance* dalam rangka mewujudkan *Good Health and Well being for people*.
3. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Local Indigenous Governance* dalam rangka meningkatkan *Quality Education*.

4. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Local Indigenous Governance* dalam rangka meningkatkan *Decent Work and Economic Growth*.
5. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Local Indigenous Governance* dalam rangka mewujudkan *Sustainable Cities and Communities*.
6. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Local Indigenous Governance* dalam rangka mendukung *Climate Action*.

Tanpa mengurangi kreativitas dan inovasi dalam melakukan penelitian, diharapkan pembatasan ruang lingkup penelitian ini dapat berdampak bagi peningkatan kualitas penelitian delegasi TEMU AdMI 2019.

4.3 Kriteria Penelitian Sub Tema *Local Indigenous*

1. Penelitian ini dilakukan pada instansi yang terkait dengan sub tema *Local Indigenous Governance*.
2. Penelitian meliputi muatan yang terdapat dalam ruang lingkup penelitian dan sejalan dengan konsep umum sub tema *Local Indigenous Governance*.
3. Penelitian membahas mengenai masalah atau isu-isu terkini mengenai aspek sub tema *Local Indigenous Governance*.
4. Penelitian harus didasarkan pada teori-teori yang relevan atau sumber-sumber ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sub tema *Local Indigenous Governance*.
5. Penelitian disertai dengan mencantumkan dasar hukum atau kebijakan-kebijakan yang terkait sub tema *Local Indigenous Governance*.
6. Penelitian mengenai setiap Sub Tema berdasarkan hasil observasilangsung.
7. Apabila tidak terdapat program yang sesuai dengan sub tema *Local Indigenous Governance*, maka sub tema tersebut dapat diadopsi sebagai rekomendasi pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan dalam objekpenelitian.
8. Hasil penelitian mampu memberikan solusi bagi instansi terkait khususnya dan pemerintah Indonesia pada umumnya di bidang yang sesuai dengan sub tema *Local Indigenous Governance*.



Referensi :

Adharinalti. 2012. Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Bali. Jurnal Rechtsinding Volume 1 Nomor 3, Desember 2012. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAMRI.

Alfian (ed.), 1985. *persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan*. Jakarta:Gramedia.

Hidayat, F., 2015. *WartaEkonomi.co.id*.

UNESCO. Local and Indigenous Knowledge Systems



BAB V

PENELITIAN SUB TEMA

CLUSTER III : ADAPTIVE GOVERNANCE

5.1 Konsep Umum

Adaptive Governance dapat didefinisikan dengan memperhatikan fokus terhadap struktur pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan kebijakan yang rasional secara prosedural serta didukung oleh ilmu alam dan sosial yang intensif. (Ronald D. Brunner and Amanda H. Lynch, 2010). *Adaptive Governance* telah muncul dalam dekade terakhir sebagai jalan teori dan praktik yang menarik untuk pengelolaan holistik masalah lingkungan yang kompleks. Penelitian tentang pemerintahan adaptif telah berkembang sejak awal lapangan, menyelidiki proses dan mekanisme yang mendukung pendekatan baru sambil menawarkan berbagai pembenaran dan resep untuk penggunaan empiris. Namun demikian, ulasan baru-baru ini mengenai tata kelola adaptif mengungkapkan beberapa kesenjangan konseptual dan praktis yang penting di lapangan, khususnya mengenai tantangan dalam penerapannya pada kasus-kasus dunia nyata. (Sharma Wallace, L. Velarde, S.J. Wreford, A., 2018)

Adaptive Governance mulai bermunculan di Indonesia setelah Revolusi Industri 4.0 dikumandangkan. Dalam hal ini tentu memberikan dampak atas penyelenggaraan pemerintah di Indonesia yang diantaranya; *Pertama*, Implementasi *Adaptive Governance* dalam bidang pendidikan. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengungkapkan, sistem pendidikan di Indonesia harus adaptif dan fleksibel agar relevan dengan tantangan revolusi industri 4.0. Untuk mendukung tujuan tersebut Kemenristekdikti telah melakukan berbagai penyederhanaan regulasi dan mencabut kebijakan yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan *online learning* sebagai modal untuk bisa menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia.

Kedua, Implementasi *Adaptive Governance* di bidang pertanian. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan Rehabilitasi Lahan Kritis sebagai bentuk Praktik Disaster yang meliputi 6 Desa di Dataran Tinggi dieng, Kabupaten Wonosobo. Praktik disaster tersebut merupakan salah satu bentuk dari *Adaptive Governance* yang mencakup *Sustainable Community* karena adanya keterlibatan masyarakat dalam menangani, pengelolaan dan mengambil keputusan di masyarakat.

Ketiga, Implementasi *Adaptive Governance* dibidang kesehatan. Hal ini dapat dilihat di Kota Bandung yang menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Provinsi Jawa Barat. Program JKN ini bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Dimana, jaminan sosial di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk dan strategi perlindungan sosial dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia yang bersifat *Adaptive* dengan pendekatan *Thinking Ahead* (antisipasi).

Dari beberapa contoh tersebut dapat dikatakan bahwa *Adaptive Governace* merupakan konsep yang dapat menjadi acuan atas penyelenggaraan pemerintah baik itu pusat ataupun daerah yang lebih menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam menyikapi sesuatu sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Susan, 2009) bahwa prinsip *adaptive* pada kemampuan pemerintah sebagai *leading sector* dalam membaca dan mengkonsolidasikan motif *stakeholder* dalam upaya untuk pengelolaan bersama sebuah objek dengan membangun *platform* kerja bersama yang pada akhirnya membentuk struktur dan jaringan kolektif sebagai wahana pertukaran sumber daya masing-masing aktor yang berkepentingan. Pendekatan *Adaptive Governance* mulai dijalankan/digalakkan dalam mengkaji tentang fungsi dan peran-peran strategis aktor dalam sebuah *concern*/fokus terhadap objek kajian *multistakeholders*.

Disamping itu *Adaptive Governance* seharusnya menyediakan kapasitas bagi manajer lingkungan dan pengambil keputusan untuk menghadapi berbagai tingkat ketidakpastian yang melekat pada sistem sosial-ekologis yang kompleks. (Chaffin, B.C. Gunderson, L.H., 2016).

Konseptualisasi teoretis terkini tentang *Adaptive Governance* hendaknya mewakili serangkaian struktur dan proses yang paling cocok untuk mengadaptasi atau mengubah rezim tata kelola lingkungan yang ada ke arah bentuk yang cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan ekologis maupun perubahan sosial yang cepat.

Tujuan dari perspektif/konsep ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana peran dan kebijakan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah dalam tata kelola pemerintahan mampu meningkatkan kapasitas adaptif atau ketahanan daerah.

Oleh karena itu, Perencanaan *Adaptive Governance* yang tepat sangatlah diperlukan dalam memenuhi target dan jadwal yang telah diproyeksikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Serta *Adaptive Governance* dapat menjadi langkah- langkah bertahap menuju tujuan jangka panjang berkelanjutan, idealnya menjadi bagian yang integral dengan kebijakan, aturan, dan program yang terkait dengan pengembangan wilayah.

5.2 Ruang Lingkup Penelitian

Pemberian batasan ruang lingkup penelitian yang dilakukan delegasi TEMU AdMI 2019 terhadap sub-tema tersebut diperlukan agar terfokus dan tidak menimbulkan persepsi bercabang. Oleh karena itu, perlu adanya penyamaan sudut pandang dalam ruang lingkup kajian penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu melebar dalam pembahasan dan substansi, serta dapat tercapainya kesamaan ragam pembahasan penelitian dantujuan.

Adapun ruang lingkup penelitian mengenai *Adaptive Governance*, di antaranya berkaitan dengan :

1. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Adaptive Governance* dalam rangka mewujudkan *Gender Equality*.
2. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Adaptive Governance* dalam rangka mewujudkan *Good Health and Well being for people*.
3. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Adaptive Governance* dalam rangka meningkatkan *Quality Education*.
4. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Adaptive Governance* dalam rangka meningkatkan *Decent Work and Economic Growth*.
5. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Adaptive Governance* dalam rangka mewujudkan *Sustainable Cities and Communities*.

6. Kebijakan Publik/Manajemen Publik/Akuntabilitas/Etika Administrasi dalam konsep *Adaptive Governance* dalam rangka mendukung *Climate Action*.

Tanpa mengurangi kreativitas dan inovasi dalam melakukan penelitian, diharapkan pembatasan ruang lingkup penelitian ini dapat berdampak bagi peningkatan kualitas penelitian delegasi TEMU AdMI 2019.

5.3 Kriteria Penelitian Sub Tema *Adaptive Governance*

1. Penelitian ini dilakukan pada instansi yang terkait dengan setiap sub tema *Adaptive Governance*.
2. Penelitian meliputi muatan yang terdapat dalam ruang lingkup penelitian dan sejalan dengan konsep umum setiap sub tema *Adaptive Governance*.
3. Penelitian membahas mengenai masalah atau isu-isu terkini mengenai aspek di setiap sub tema *Adaptive Governance*.
4. Penelitian harus didasarkan pada teori-teori yang relevan atau sumber-sumber ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai setiap sub tema *Adaptive Governance*.
5. Penelitian disertai dengan mencantumkan dasar hukum atau kebijakan-kebijakan yang terkait setiap sub tema *Adaptive Governance*.
6. Penelitian mengenai setiap sub tema *Adaptive Governance* berdasarkan hasil observasi langsung.
7. Apabila tidak terdapat program yang sesuai dengan sub tema *Adaptive Governance*, maka sub tema tersebut dapat dilakukan dengan cara mengadopsi sebagai rekomendasi pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan dalam objek penelitian.
8. Hasil penelitian mampu memberikan solusi bagi instansi terkait khususnya dan pemerintah Indonesia pada umumnya di bidang yang sesuai dengan setiap sub tema *Adaptive Governance*.

Referensi :

Chaffin, B.C. Gunderson, L.H. (2016). Emergence, institutionalization and renewal: Rhythms of *Adaptive Governance* in complex social-ecological system. *Journal of Environmental Management* , 1.



Temu AdMI 2019

Ronald D. Brunner and Amanda H. Lynch. (2010). *Adaptive Governance and Climate Action*. American Meteorological Society.

Saputra, A. T. (2018). *Mewujudkan Pembangunan Babel Lebih Merata Melalui Perda RZWP3K*. Bangka Belitung: Diskominfo. (diakses 07-04-2019, 11:51, www.babelprov.go.id)

Sharma Wallace, L. Velarde, S.J. Wreford, A. (2018). *Adaptive Governance Good Practice: Show me the evidence*. *Journal of Environmental Management*.

Susan, B. (2009). *In Pursuit of Sustainable Development: A Governance Perspective*.



www.officialtemuadmi.org

Instagram: [@official_temuadmi](https://www.instagram.com/official_temuadmi)

Website: info.temuadmi

YouTube: [Official Temu Admi](https://www.youtube.com/OfficialTemuAdmi)

Email: info@officialtemuadmi.org

BAB VI

KRITERIA LUARAN PENELITIAN

6.1 Sistematika Penulisan Paper

Paper penelitian ini ditulis menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. **UKURAN KERTAS** : A4
2. **FONT** : huruf Times New Roman ukuran 12 jarak baris 1,5 spasi kecuali Abstract/Abstrak 1 spasi. Margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, bawah masing-masing 3cm.
3. **JUDUL** : tanpa cover dan daftar isi, hanya memuat tim penulis, afiliasi, dan alamat email Judul. Ditulis dengan Font Times New Roman 12 Cetak Tebal (Maksimum 12 Kata).

Isi paper menggunakan format Journal yaitu *Abstract*, Pendahuluan sampai dengan kesimpulan dibuat maksimal 30 halaman, dengan anjuran komposisi sebagai berikut :

1. Abstrak
2. Bab 1 Pendahuluan
3. Bab 2 Kajian Literatur
4. Bab 3 Metode
5. Bab 4 Hasil dan Pembahasan
6. Bab 5 Kesimpulan
7. Referensi

Halaman utama yang dimulai dari Abstrak dan Pendahuluan sampai dengan halaman Lampiran diberi halaman dengan angka: 1, 2, 3, ..., dst. yang diletakkan pada sudut kanan atas, kecuali untuk halaman yang memuat judul bab nomor halaman diletakkan di center bawah. Selanjutnya, untuk format penulisan makalah mengikuti sistematika sebagai berikut:

1. ABSTRAK/ABSTRACT

Mencerminkan isu-isu pokok, tujuan penulisan, metoda/pendekatan dan hasil pembahasan. Uraian ditulis dalam bahasa Inggris yang masing-masing tidak lebih dari 200 kata dan dijadikan satu alenia. Dalam Abstrak terdapat terdapat maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. Untuk format penulisan menggunakan Times New Roman 10, spasi tunggal, dan cetak miring.

2. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi penulisan. Tujuan penulisan dan rencana pemecahan masalah melalui tulisan disajikan dalam bagian ini. Untuk format penulisan menggunakan *Times New Roman*, 12, normal.

1.1 Latar Belakang Penelitian

- a. Mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang pemilihan topik penelitian, termasuk signifikansi pemilihan topik penelitian, fenomena yang menarik, dan permasalahan yang diteliti. Penelitian dapat diangkat dari gejala/permasalahan empiris dan/atau permasalahan teoretis.
- b. Mengemukakan dan meletakkan penelitian yang akan dilakukan dalam peta keilmuan yang menjadi perhatian peneliti.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Mengemukakan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan yang ada dalam rumusan masalah.

1.2.2 Manfaat Penelitian

Mengungkapkan secara spesifik manfaat yang akan dicapai dari:

- a. **Aspek teoretis** (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoretis apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti.
- b. **Aspek praktis** (guna laksana) dengan menyebutkan kegunaan apayang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini.

3. BAB 2 KAJIAN LITERATUR

Pada bagian ini berisi kajian tentang (beberapa) konsep/teori yang relevan dengan masalah/pokok persoalan yang diteliti sebagai penunjang konsep penelitian. Dalam bagian ini, kajian literatur tidak terbatas pada teori saja, tetapi juga bukti- bukti empiris, sehingga diperlukan kajian/diskusi mengenai konsep dan teori berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah.

Uraian tentang tinjauan/kajian pustaka ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana literatur tersebut memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang topik penelitian dan untuk menerangkan kerangka konseptual/teoretis yang akan digunakan. Bab ini juga memuat kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dirumuskan.

4. BAB 3 METODE

Menguraikan metode yang akan digunakan dalam penelitian, mencakup :

- a. Ruang Lingkup atau Objek Penelitian.
- b. Uraian tentang rancangan penelitian dan metode penelitian yang dipilih: metode kuantitatif dan/atau metode kualitatif.
- c. Bahan dan alat utama.
- d. Prosedur pengambilan/pemilihan sampel dan penentuan unit analisis.
- e. Sumber dan teknik pengumpulan data serta instrumen penelitian.
- f. Pengolahan dan analisis data sesuai dengan rancangan penelitian yang diusulkan.
- g. Lokasi dan waktu penelitian

5. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil dan pembahasan. Pembahasan dapat disajikan dalam beberapa sub-bab sesuai dengan kebutuhan. Hasil dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.

6. BAB 5 KESIMPULAN

Bab ini menyatakan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti berkaitan dengan makalah berupa simpulan dan saran.

5.1 Simpulan

Sub-bab ini menyatakan temuan-temuan penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

5.2 Rekomendasi

Sub-bab ini menyatakan poin-poin rekomendasi dari peneliti (delegasi) kepada stakeholder terkait berdasarkan hasil penelitian. Rekomendasi ini akan dibahas pada kegiatan puncak Temu ADMI.

7. REFERENSI

Referensi berisi seluruh kepustakaan yang digunakan/dirujuk dalam paper penelitian. Semua pustaka yang disitasi (dikutip) dalam makalah penelitian harus tercantum dalam daftar pustaka dan ditulis nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal atau nama penerbit dan kota penerbitan. Susunan nama-nama penulis pustaka yang disitasi, mengikuti huruf abjad dan ditulis satu spasi dengan menggunakan format APA.

8. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi lampiran data atau hal lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang dianggap penting untuk disertakan namun tidak perlu disajikan dalam bab makalah. Misalnya, lampiran data dasar, angket/kuesioner dan pedoman wawancara, foto, peta lokasi, dan persetujuan komisi etik bagi yang mensyaratkan dan lain-lain.



BAB VII

REVIEWING DAN EVALUASI MAKALAH PENELITIAN

Reviewing dan Evaluasi makalah penelitian dilakukan oleh IAPA (*Indonesian Association for Public Administration*) sebagai pihak yang berkompeten dalam melakukan penilaian terhadap makalah penelitian delegasi, dengan tema-tema yang menjadi kajian dari Ilmu Administrasi Negara/Publik. Gagasan mengenai kegiatan *Reviewing* dan Evaluasi makalah yang dilakukan oleh IAPA didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. IAPA merupakan Asosiasi Ilmu Administrasi Publik/Negara yang resmi dan beranggotakan para administrator yang berpengalaman dari kalangan akademisi dan praktisi yang memiliki modalitas keilmuan yang memadai.
- b. IAPA memiliki berbagai program dalam melakukan kajian-kajian seputar keilmuan Administrasi Publik/Negara, termasuk diseminasi hasil-hasil kajian dalam seminar juga penerbitan buku.
- c. IAPA juga melakukan kegiatan pendampingan untuk pemerintah daerah sehingga mengetahui kondisi lapangan mengenai tata kelola pemerintahan di daerah.
- d. Dengan keterlibatan IAPA, diharapkan makalah penelitian para delegasi Temu AdMI 2018 dapat memiliki *bargaining power* yang lebih untuk menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah nantinya.

Hasil dari kegiatan *reviewing* dan evaluasi tersebut nantinya akan menghasilkan keputusan tentang revisi makalah. Delegasi yang mengirimkan luaran makalah penelitian yang tidak sesuai dengan kriteria dibawah ini, maka harus melakukan revisi makalah penelitian yang diadakan dalam satu kali tahapan saja.



Temu AdMI 2019

BAB VIII

PENUTUP

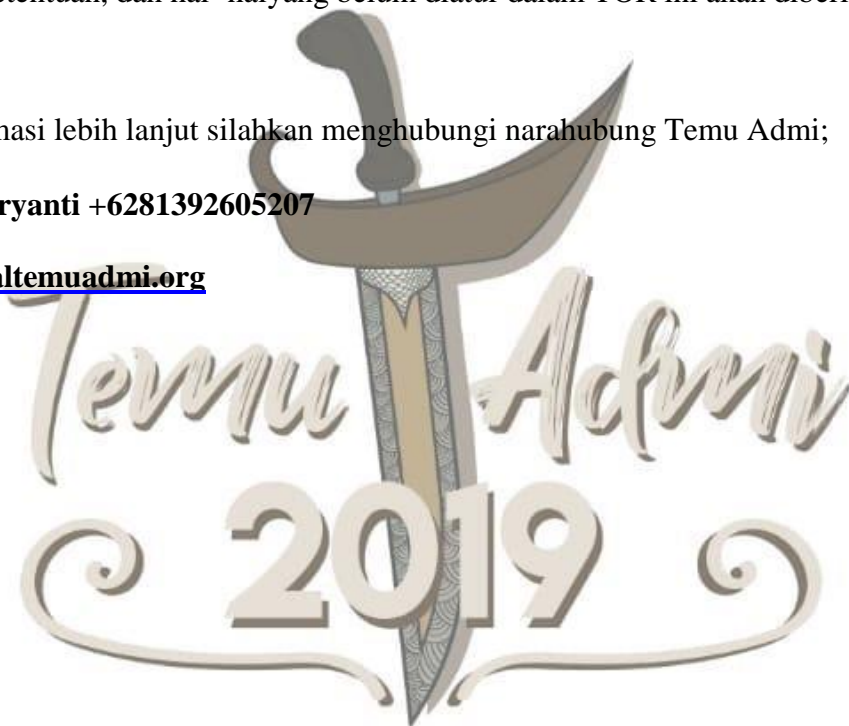
Demikianlah *Term of Reference* (TOR) Penelitian Kegiatan Temu Administrator Muda Indonesia (Temu AdMI) Tahun 2019 ini dibuat, agar menjadi panduan bagi para delegasi Temu AdMI dalam melakukan kegiatan penelitian sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan Temu AdMI Tahun 2019 di Universitas Sebelas Maret. *Term of Reference* (TOR) ini diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dalam penyusunan TOR ini tidak tertutup kemungkinan adanya kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk lebih menyempurnakan *Term of Reference* (TOR) ini. Jika terjadi perubahan ketentuan, dan hal-hal yang belum diatur dalam TOR ini akan diberitahukan lebih lanjut.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi narahubung Temu Admi;


Ria Febri Aryanti +6281392605207

info@officialtemuadmi.org

-



www.officialtemuadmi.org

 **@official_temuadmi**

 **info.temuadmi**

 **Official Temu Admi**

 **info@officialtemuadmi.org**



Lampiran 1

**JUDUL DITULIS DENGAN
FONT TIMES NEW ROMAN 12 CETAK TEBAL
(MAKSIMUM 12 KATA)**

Penulis¹⁾, Penulis²⁾ dst. [Font Times New Roman 10 Cetak Tebal dan Nama Tidak Boleh Disingkat]

¹⁾Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi (penulis 1)

email: penulis _1@abc.ac.id

²⁾Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi (penulis 2)

email: penulis _2@cde.ac.id

Abstract [Times New Roman 10 Cetak Tebal dan Miring]

Abstract ditulis dalam bahasa Inggris yang berisikan isu-isu pokok, tujuan penulisan, metoda/pendekatan dan hasil pembahasan. Abstract ditulis dalam satu alenia, tidak lebih dari 200 kata. (Times New Roman 10, spasi tunggal, dan cetak miring).

Keywords: *Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times New Roman 10 spasi tunggal, dan cetak miring]*

1. PENDAHULUAN [Times New Roman 12 bold]

Pendahuluan mencakup latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi penulisan. Tujuan penulisan dan rencana pemecahan masalah melalui tulisan disajikan dalam bagian ini. [Times New Roman, 12, normal].

2. KAJIAN LITERATUR

Bagian ini berisi kajian literatur yang dijadikan sebagai penunjang konsep penelitian. Kajian literatur tidak terbatas pada teori saja, tetapi

juga bukti-bukti empiris. [Times New Roman, 12, normal].

3. METODE

Metode menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan teknik analisis. [Times New Roman, 12, normal].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil dan pembahasan. Hasil dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data,



menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.[Times New Roman, 12, normal].

5. KESIMPULAN

Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas hasil pembahasan.[Times New Roman, 12, normal].

6. REFERENSI

Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi (*reference manager*) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote dan lain-lain. [Times New Roman, 12, normal].





Lampiran II

Format Biodata Delegasi

A. Identitas Diri

1. *Steering Committee*

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin : L/P
Jurusan / Program Studi :
NPM/NIM :
Tempat,Tanggal Lahir :
E-mail :
Nomor Hp :
Motto Hidup :

**FOTO
(3X4)**

2. **Ketua**

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin : L/P
Jurusan / Program Studi :
NPM/NIM :
Tempat,Tanggal Lahir :
E-mail :
Nomor Hp :
Motto Hidup :

**FOTO
(3X4)**



Temu AdMI 2019

3. Anggota

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin : L/P
Jurusan / Program Studi :
NPM/NIM :
Tempat,TanggalLahir :
E-mail :
NomorHp :
MottoHidup :

FOTO
(3X4)

4. Anggota

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin : L/P
Jurusan / Program Studi :
NPM/NIM :
Tempat,TanggalLahir :
E-mail :
NomorHp :
MottoHidup :

FOTO
(3X4)



Dengan ini saya menyatakan bahwa semua data yang tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan kenyataan.

Kota, 2019

Ketua Tim Penelitian

(Nama Lengkap)

NPM/NIM

